

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan Politik Luar Negeri menjadi hal sentral utamanya dalam politik hubungan antar negara. Turki sendiri menjadi wilayah dengan letak geografis yang unik karena letaknya yang berada dalam dua benua yakni benua Eropa dan Asia. Letak geografisnya yang strategis membuat Turki menjadi negara dengan posisi yang cukup penting karena menjadi jalur penghubung antara Timur dan Barat.

Menilik ke belakang, Turki memiliki sejarah yang dapat dikatakan antik, mengingat nilai-nilai budayanya yang sarat akan makna. Pada negara inilah pernah berdiri kerajaan Islam yang berjaya, bahkan kekuatannya tak diragukan lagi di seluruh penjuru dunia. Oleh karena itu, segala keputusan politik, maupun kebijakan luar negeri yang diambil oleh Turki akan sangat menarik perhatian dunia. Terlebih pada kepemimpinan Erdogan saat ini, banyak pengamat yang mengatakan bahwa gaya kepemimpinan Erdogan cenderung Islamis. Dalam sebuah artikel publikasi juga disebutkan bahwa Recep Tayyib Erdogan adalah politisi yang dijuluki sebagai penghapus Sekularisme warisan Mustafa Kemal Attaturk (Junaidi, 2016).

Turki sudah sering terlibat dalam konflik yang ada di Timur Tengah. Mulai dari keterlibatan Turki dalam Konflik Suriah pada tahun 2011-2012, hingga bagaimana saat ini Turki tampak berada di pihak Palestina dalam konflik berkepanjangan dengan Israel. Sepertinya, kita tak lagi dapat meremehkan keberadaan Turki karena keberanian dan kekuatannya dalam merespon dan menangani permasalahan-permasalahan yang ada di Timur Tengah. Dapat dikatakan bahwa kehadiran Turki untuk terlibat dan mempengaruhi penyelesaian konflik internal dan masa depan Timur Tengah tampaknya lebih agresif daripada Arab Saudi, negara dengan pengikut Sunni yang besar, begitupun halnya Iran, negara dengan mayoritas pengikut Syiah. (Nainggolan, 2020). Peran signifikan Turki dalam

mempengaruhi perkembangan politik dan situasi keamanan kawasan saat ini serta keberadaan dan tindakan Erdogan dan Turki, sangat menarik untuk dianalisis terutama dalam studi kasus ini.

Disamping itu, bukan hal yang terdengar asing bahwa keberadaan Israel menarik perhatian khusus bagi Timur Tengah karena konflik tak berujungnya dengan Palestina. Negara-bangsa Israel penganut Yahudi (yang menjadi lawan konflik negara-bangsa Palestina-Muslim) sejak diproklamirkan pada tahun 1948, telah menunjukkan eksistensinya di panggung sejarah dunia (Muchsin, 2015, hal. 391). Sementara itu, Palestina awalnya merupakan bagian dari Daulah Islamiyah di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Namun, daerah ini kemudian dikuasai oleh Inggris (1917), dan kemudian 48% wilayahnya dianeksasi oleh orang Yahudi Israel. Palestina yang mayoritas penduduknya beragama Islam menjadi tidak merdeka (Muchsin, 2015).

Tidak bisa dipungkiri bahwa kawasan Timur Tengah merupakan kawasan yang sering diterpa carut marut konflik. Hal tersebut terjadi salah satunya karena banyak negara di Timur Tengah yang belum stabil secara sosial dan politik. Campur tangan negara Barat juga lekat dalam menjaga stabilitas kawasan Timur Tengah karena disana terdapat kepentingan krusial Barat salah satunya yakni minyak (Alasdair & Blake, 1985, hal. 112). Saat ini, dimana dunia sangat mengutamakan perhitungan untung-rugi, tak jarang terdapat suatu negara yang menghalalkan segala cara demi mencapai tujuan dan kepentingannya. Konflik antara Israel dan Palestina sejatinya telah mengundang simpati negara-negara Muslim tak terkecuali bagi negara Muslim di Timur Tengah. Palestina tentunya memiliki harapan besar untuk merdeka. Namun, dengan keterbatasan kemampuan negaranya, Palestina sangat berharap kepada negara-negara Muslim di dunia terutama negara Muslim di kawasan Timur Tengah agar dapat mendukung negara Palestina untuk merdeka.

Harapan Palestina tersebut bisa jadi terkurung, sebab beberapa waktu lalu, beberapa negara Muslim di Timur Tengah telah melakukan normalisasi hubungan negara dengan Israel. Salah satu negara yang melakukan normalisasi hubungan tersebut adalah Uni Emirat

Arab. Pada 13 Agustus 2020, UEA menyetujui normalisasi hubungan penuh dengan Israel. Normalisasi ini menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara Arab ketiga, setelah Mesir dan Yordania, yang menjalin hubungan penuh dengan Israel (Muhammad, 2020).

Normalisasi tersebut tentunya mengejutkan dunia, mengingat Uni Emirat Arab merupakan negara Muslim. Kebijakannya untuk melakukan normalisasi hubungan dengan Israel telah mengkhianati perjuangan rakyat Palestina dan melempar jauh-jauh harapan Muslim Palestina dalam mendapatkan dukungan untuk merdeka. Turki menjadi salah satu negara yang merespon hubungan normalisasi tersebut. Turki merupakan negara dengan mayoritas Muslim, dan semenjak kepemimpinan Erdogan, solidaritas sesama umat muslim memang meningkat di Turki.

Turki menganut prinsip sekulerisme dalam menjalankan politik pemerintahannya. Walaupun begitu, beberapa waktu ini, Turki lekat hubungan-nya dengan isu-isu dunia Muslim. Beberapa contohnya yakni keputusan Erdogan untuk mengubah kembali Hagia Sophia menjadi Masjid yang selama delapan dekade belakang ini merupakan museum (Uras, 2020). Pada bulan Juli lalu, masyarakat Turki juga meyerukan perlindungan terhadap Masjid Al-Aqsa dari pendudukan Israel dan berseru untuk mendukung perjuangan Palestina dari Israel (Barakat, 2020).

Analisa pengambilan keputusan dalam kepemimpinan Erdogan dapat menjadi alasan dasar mengapa Turki merespon normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel. Saat ini, Turki memang sedang memainkan peran dominan-nya di kawasan Timur Tengah, karenanya, hal ini menarik untuk didiskusikan. Kemunculan Turki dalam merespon normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel juga menjadi hal menarik untuk didiskusikan, pasalnya, Turki sendiri sebelumnya memiliki hubungan yang cukup intens dengan Israel. Bahkan hubungan diplomatik keduanya telah berlangsung kurang lebih selama 72 tahun (Isik, 2016).

Ditengah kekecewaan umat Muslim atas sikap negara-negara Arab yang memutuskan melakukan normalisasi hubungan dengan Israel, penulis mencoba untuk menjelaskan

bagaimana respon Erdogan dalam menyikapi normalisasi hubungan penuh yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab dengan Israel, serta alasan mengapa Turki merespon demikian. Pembahasan akan dilakukan menggunakan penelitian kualitatif dan dengan pendekatan konstruktivis, yang mana pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang dekat ajarannya dengan konsep hubungan internasional menurut Islam.

1.2. Rumusan Masalah

1. Mengapa Turki mengecam kebijakan Uni Emirat Arab dalam normalisasi hubungannya dengan Israel?

1.3. Kerangka Teori/Konseptual

Analisis Politik Luar Negeri dalam Perspektif Konstruktivisme

Sebelum mengetahui apa itu analisis politik luar negeri, baiknya kita mengulas kembali terlebih dahulu apa yang dimaksud *foreign policy* atau politik luar negeri. Politik luar negeri merupakan “*action theory*” atau kebijaksanaan suatu negara yang ditujukan negara lain untuk mencapai suatu kepentingan tertentu. Secara umum dapat juga diartikan sebagai suatu perangkat formula, nilai, arah, serta sasaran untuk mempertahankan, mengamankan, dan memajukan kepentingan nasional (Kurniawan, 2017). Sehingga, analisis kebijakan politik luar negeri dapat diartikan sebagai suatu cabang ilmu politik yang berhubungan dengan pengembangan teori dan kajian empiris mengenai proses dan hasil kebijakan luar negeri.

Terdapat tiga paradigma yang dapat digunakan dalam menganalisa politik luar negeri. Pertama, yakni menurut Richard Snyder, analisa dapat dilakukan dengan melihat proses pembuatan kebijakan luar negeri sebagai penjelasan, bukan hanya melihat hasil dari

kebijakan luar negeri itu saja. Kedua, menurut James Rosenau, analisa dapat dilakukan dengan melihat pengembangan teori terhadap aktor secara spesifik. Terakhir menurut Harold dan Margaret Sprout, politik luar negeri hanya dapat dijelaskan dengan melihat *psychology*, situasi politik, dan konteks sosial (Hara, 2011). Dapat disimpulkan sebagai bidang studi, analisis kebijakan luar negeri ditandai oleh fokus aktor-spesifiknya. Dalam istilah yang paling sederhana, ini adalah studi tentang proses, efek, penyebab, atau output dari pengambilan keputusan kebijakan luar negeri baik secara komparatif atau kasus-spesifik. Argumen yang mendasari dan sering implisit berteori bahwa manusia, bertindak sebagai kelompok atau dalam suatu kelompok, menyusun dan menyebabkan perubahan dalam politik internasional.

Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kebijakan politik luar negeri. Itulah mengapa kebijakan luar negeri suatu negara juga dapat berubah-ubah sesuai dengan urgensi kebutuhan negara yang bersangkutan dan bagaimana kebijakan dalam negerinya terlaksana. Menurut paradigma konstruktivis yang dipaparkan oleh Alexander Wendt, pembuatan kebijakan luar negeri dapat dipengaruhi oleh identitas aktor yang menjalankannya (Wendt, 1999). Konstruktivisme sendiri merupakan pendekatan teoritis Hubungan Internasional yang mulai populer sejak dekade 1990an setelah Perang Dingin berakhir. Konstruktivisme adalah pendekatan teoretis dalam hubungan internasional yang mulai populer sejak tahun 1990-an setelah berakhirnya Perang Dingin. Konstruktivisme berpendapat bahwa sangat penting untuk memahami bagaimana aktor mengembangkan kepentingannya. Paradigma konstruktivisme sendiri muncul atas dasar ketidakpuasan para ilmuwan rasionalis karena mereka melihat teori sebagai realis dan liberal yang tidak dapat menjelaskan secara detail fenomena global yang terjadi. Menurut konstruktivisme, fenomena yang terjadi tidak lepas dari adanya hubungan, nilai-nilai sosial dan identitas yang menentukan perilaku dan *interest*.

Pemikiran utama dalam konstruktivis adalah, pertama-tama, struktur sebagai model perilaku aktor sosial dan politik, baik individu maupun negara, yang tidak hanya terdiri dari aspek material, tetapi juga aspek normatif dan ideasional. Kedua, kepentingan (sebagai dasar

tindakan atau perilaku politik) tidak mewakili seperangkat preferensi standar yang dianut oleh aktor politik, melainkan sebagai produk identitas aktor. Ketiga, struktur dan identitas saling mendefinisikan. Konstruktivis pada dasarnya adalah struktur yang menekankan peran struktur non-materi dalam identitas dan kepentingan, sementara juga menekankan peran praktik dalam membentuk struktur tersebut. Tiga konsep utama konstruktivisme adalah identitas, norma, dan tindakan komunikatif. Tokoh-tokoh pemikiran konstruktif klasik berasal dari para pemikir sosial seperti Hegel, Kant, dan Grotius. Sementara itu, setelah Perang Dingin, mulai bermunculan kaum konstruktivis yang cenderung berpikir tentang politik internasional seperti Karl Deutch, Ernst Haas dan Hedley Bull. Tokoh konstruktivisme lainnya yang tidak kalah hebat adalah Friedrich Kratochwill (1989), Nicholas Onuf (1989) dan Alexander Wendt (1992).

Keberadaan konstruktivisme juga muncul sebagai kritik terhadap neoliberalisme dan neorealisme (Dugis, 2005). Menurutnya, manusia adalah makhluk individu yang dibangun melalui realitas sosial. Konstruksi manusia akan memunculkan pemahaman intersubjektivitas. Hanya dalam proses interaksi sosial manusia akan saling memahami. Melihat hubungan antar individu, nilai-nilai hubungan tidak diberikan pada satu sisi, tetapi kesepakatan untuk berinteraksi harus dibuat atas kesepakatan antara kedua belah pihak. Konstruktivisme juga berpendapat bahwa setiap tindakan negara didasarkan pada makna yang berasal dari interaksinya dengan lingkungan internasional.

Konsep *State Identity* dalam Teori Konstruktivisme

Pada tahun 1990-an, seorang pakar dan kawan-kawannya bernama Scott Burchill dan Andrew Linklater mencoba menunjukkan bahwa sampai saat ini teori Hubungan Internasional (yang ada pada saat itu) belum mampu menjelaskan semua dinamika sistem internasional. Bagi mereka, tidak ada teori Hubungan Internasional yang mampu menjadi acuan dan bahkan memprediksi model hubungan antar negara (Rachmawati, 2012). Meskipun kaum realis sudah mulai memasukkan ancaman non-tradisional dalam

pertimbangan hubungan antar negara, isu-isu baru yang muncul akibat konstruksi sosial (seperti isu hak asasi manusia misalnya) belum menjadi hal yang dianggap mampu mempengaruhi struktur keamanan suatu negara. Sementara itu, dalam pendekatan liberalisme, meski sedikit banyak telah menyentuh isu lingkungan dan gender dalam hubungan internasional, namun hal tersebut bukan menjadi kajian utama dalam mengkaji perilaku antar negara. Dalam perspektif liberalisme, motivasi utama negara untuk bekerja sama hanyalah alasan logis yang dibangun untuk kepentingan ekonomi dan kesejahteraan. Keterbatasan kedua pendekatan ini yang kemudian menimbulkan perdebatan dan telah menyebabkan lahirnya pendekatan konstruktivisme.

Konstruktivisme hadir dalam perspektif internasional untuk berkontribusi dengan cara berpikir yang berbeda dari pendapat yang ada. Konstruktivisme lahir sejalan dengan ide-ide para teoretikus kritis lain yang membongkar cara-cara positivis dalam mengkonstruksi pengetahuan dan membongkar fenomena (Rachmawati, 2012). Pada dasarnya, konstruktivisme mengasumsikan bahwa politik internasional adalah hasil dari suatu ‘konstruksi sosial’. Sehingga, politik internasional diarahkan secara intersubjektif oleh norma, nilai, dan prinsip yang dilakukan oleh aktor internasional. Hal tersebut selaras dengan pernyataan Alexander Wendt dimana Konstruktivis memprioritaskan tiga konsep yang mempengaruhi tindakan manusia, yaitu identitas, norma, dan bahasa (Wendt, 1999).

Alexander Wendt memberikan definisi dari identitas sebagai “atribut yang melekat pada diri aktor yang mendorong tindakan” (Wendt, 1999, hal. 224). Itu berarti bahwa konsep *State Identity* dalam pendekatan konstruktivisme menjelaskan bahwa identitas yang dimiliki oleh suatu negara dapat berpengaruh terhadap proses pembuatan kebijakan suatu negara. Identitas merupakan sesuatu yang sejatinya telah tertanam pada aktor, dan biasanya identitas sebuah negara dapat terbentuk dari bagaimana sikap aktor atau negara dalam menjalin hubungan dengan aktor lainnya. Identitas suatu negara dapat dibentuk atau dipengaruhi dari dalam negeri atau yang disebut juga dengan *internal dimension*. Dimensi internal ini dapat berupa norma atau budaya yang diterapkan dan menjadi prinsip bagi masyarakat yang ada di

dalam negara tersebut. Sebaliknya, identitas suatu negara juga dapat dipengaruhi oleh *eksternal dimension*. Dimensi eksternal ini dapat berupa hubungan antara suatu negara dengan negara lain atau sebagainya. Dengan terbentuknya suatu identitas, maka hal tersebutlah yang nantinya akan mempengaruhi tindakan/kebijakan suatu negara.

Apabila kebijakan luar negeri suatu aktor yang dipengaruhi oleh faktor internal (seperti unsur negara, opini publik, dan lainnya) digabungkan dengan faktor eksternal (nilai dan norma internasional, opini dari aktor lainnya, dan lain-lain) maka nantinya akan terlihat dimana posisi suatu aktor dan bagaimana aktor tadi seterusnya bertindak dalam hubungan internasional (Holsti, 1970). Suatu aktor juga dapat memiliki beberapa identitas secara sekaligus, tergantung dari situasi apa yang sedang dihadapi negara tersebut (Rosyidin, 2015). Tetapi, ketika aktor tersebut memiliki dua identitas atau lebih yang saling bertolak belakang ketika menghadapi situasi yang sama, hal inilah yang kemudian dikenal sebagai konflik identitas (*identity/role conflict*) (Hendropuspito, 1989, hal. 105-107). Secara umum, aktor tersebut sebenarnya dapat bernegosiasi dan memilih identitas yang lebih relevan dan penting dalam menghadapi situasi tanpa mengorbankan identitas lainnya. Namun, dalam kondisi tertentu, aktor dapat melakukan pengorbanan dengan menghilangkan salah satu identitas yang saling bertentangan untuk menyelesaikan situasi yang dihadapi (Settles, Sellers, & Damas, 2002, hal. 575-576).

Konsep Neo-Ottomanisme

Berdasarkan pendapat Alexander Wendt, kita dapat mengartikan politik luar negeri sebagai seperangkat kebijakan yang berperan dan berpengaruh dalam hubungan suatu negara dengan negara lain dan juga sebagai respon atau tanggapan terhadap peristiwa dan masalah di lingkungan internasional. Dalam hal ini, faktor nilai dan identitas aktor pelaksana akan sangat berpengaruh terhadap kebijakan apa yang akan diambil suatu negara. Oleh karena itu, dalam konteks isu kecaman Turki terhadap normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan

Israel, kita dapat melihat dan menganalisis identitas aktor pembuat kebijakan untuk mengetahui dan menyimpulkan mengapa kebijakan tersebut diambil.

Melihat latar belakang sejarah, bukan hal yang terdengar asing, bahwa di tanah Turki pernah berdiri kerajaan Islam Turki Utsmani yang sangat berjaya pada masanya. Turki menjadi bagian terpenting dari sejarah peradaban Islam dunia. Disana, pernah terjadi lompatan peradaban yang sangat canggih dibandingkan dengan peradaban-peradaban lainnya pada abad pertengahan. Kerajaan Turki Utsmani berkembang menjadi sebuah kerajaan besar yang dapat bertahan dalam kurun waktu yang cukup lama. Pada masa kejayaannya, Turki Utsmani berhasil menaklukkan beberapa wilayah yang mencakup Bizantium, negara-negara di Semenanjung Balkan, pulau-pulau di Mediterania Timur, Hungaria, Rusia, Irak, Suriah, Kaukasus, Palestina, Mesir, beberapa negara Arab, dan Afrika Utara (Ergec, 2014). Lebih dari itu, Turki Utsmani juga berhasil menorehkan berbagai pencapaian gemilang dalam bidang pendidikan dan berbagai aspek kehidupan lainnya.

Pencapaian gemilang Turki Utsmani tersebut tidak terlepas dari identitas Turki Utsmani yang lekat dengan nilai-nilai Islam sufisme. Konsep sufisme telah memainkan peranan yang sangat penting dalam kerajaan Turki Utsmani seperti dalam bidang politik, spiritual, militer, bahkan intelektual sejak berabad-abad lamanya. Sebagai bangsa yang memiliki kekuatan dan misi untuk memperluas pengaruh, Turki Usmani juga berperan aktif dalam melindungi Palestina dari bangsa Yahudi. Wilayah Palestina berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani pada 1876-1909, dimana kepemimpinan saat itu dipegang oleh Sultan Abdul Hamid II (Rahmawati, 2017).

Turki Utsmani kemudian bertahan kurang lebih selama tujuh abad, dan setelah itu mulai hancur secara perlahan dikarenakan maraknya gerakan-gerakan perlawanan. Gerakan perlawanan tersebut muncul karena mulainya pengaruh dan nilai-nilai Barat yang masuk dan diyakini oleh sebagian besar masyarakat internal Turki Utsmani. Pada saat itu, pemuda-pemuda yang menginginkan adanya revolusi Turki (atau yang dikenal dengan *Young Turks*) bergegas menggunakan kesempatan tersebut dengan mendirikan Republik Turki, dan secara

resmi memproklamkan kemerdekaan Republik Turki pada tanggal 29 Oktober 1923. Dalam kesempatan bersejarah tersebut, terpilihah Mustafa Kemal Pasha Attaturk sebagai Presiden pertama Republik Turki (Tabrani, 2016).

Mustafa Kemal Ataturk memiliki pemikiran dan gagasan politik yang berbeda dengan kerajaan Turki Utsmani sebelumnya. Ia menginginkan Turki bertransformasi menjadi negara modern dan maju sebagaimana negara-negara Eropa. Ia melakukan beberapa langkah dalam transformasi politik dengan Westernisasi dan Sekulerisme atau yang dikenal dengan ideologi Kemalisme (Tabrani, 2016). Ideologi tersebut digunakan Mustafa Kemal dalam memimpin negaranya, yang juga sekaligus menjadi identitas Turki pada saat itu. Dari ideologi Kemalisme tersebut, Mustafa Kemal membuat dua pilar dalam membangun Republik Turki, salah satunya yakni membangun identitas sekuler, yang memisahkan segala bentuk perpolitikan dengan nilai-nilai agama.

Selama beberapa dekade dalam kekangan sistem sekulerisme, tepatnya setelah Mustafa Kemal wafat pada 1938, akhirnya Turki secara perlahan mulai kembali menunjukkan wajah Islam yang dulu sempat digaungkan Turki Utsmani utamanya dalam perpolitikan Turki. Hal tersebut berawal ketika Perdana Menteri Adnan Menderes masuk dalam pemilihan multipartai pertama Turki di tahun 1950. Perdana Menteri Menderes selama masa jabatannya menekankan pentingnya identitas Muslim bagi bangsa Turki yang telah memudar karena sistem sekuler. Ia juga menyoroti perbaikan penyimpangan yang dilakukan oleh rezim sekuler dengan memulihkan hak-hak umat Islam (Zainal, 2016). Dalam politik internasional, Menderes juga mulai menggeser orientasi politik luar negeri Turki yang lebih difokuskan ke arah Timur Tengah dan kawasan yang dahulu berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani, yang sebelumnya diabaikan oleh rezim sekuler Mustafa Kemal Attaturk.

Wajah bawaan Turki Utsmani tersebut perlahan mulai terlihat di Turki hingga pada 14 Agustus 2001, munculah sebuah partai berhaluan Islam dalam kancah perpolitikan Turki yakni Partai AKP (*Adalet ve Kalkinma Partisi*) (Zainal, 2016). Pendiri Partai AKP adalah Abdullah Gul dan Recep Tayyip Erdogan. Meski tergolong masih baru dalam perpolitikan

Turki pada saat itu, akan tetapi partai AKP memiliki anggota yang cukup banyak dan mayoritas berasal dari kalangan menengah. Di bawah pemerintahan AKP, sejarah perpolitikan Turki meraih beberapa pencapaian yang mengagumkan yang mendorong kepuasan masyarakat terhadap partai tersebut. Dalam bidang ekonomi, Turki berhasil menduduki posisi sebagai salah satu negara besar terkuat (G-20) dengan rata-rata peningkatan sebesar 10% pertahun. Selain ekonomi, pencapaian lainnya yang berhasil dilakukan partai AKP adalah dengan memberi perlindungan terhadap hak-hak kebebasan individu seperti penggunaan hijab bagi muslimah Turki dan lain sebagainya.

Beberapa hal tersebut setidaknya cukup menunjukkan implementasi kepentingan Turki saat ini yang merujuk pada identitas baru atau yang mereka sebut dengan Neo-Ottomanisme. Dibawah kekuasaan Erdogan, Turki seolah memutar arah dalam kepentingan untuk memunculkan kembali identitas Turki yang Islami sebagaimana yang telah diupayakan oleh pendahulunya. Konsep Neo-Ottomanisme telah membentuk Turki sebagai negara yang aktif di kawasan maupun global. Erdogan saat ini sepertinya tidak begitu menampik bahwa ia menginginkan Turki sebagai pusat politik dunia dengan merangkul wilayah-wilayah yang dulu dikuasai Turki Utsmani, seperti Balkan, Kaukasus, hingga Timur Tengah. Hal tersebut merujuk pada pernyataan mantan Perdana Menteri Turki, Ahmet Davutoglu, yang berbunyi:

“As in the sixteenth century, when the Ottoman Balkans were rising, we will once again make the Balkans, the Caucasus, and the Middle East, together with Turkey, the center of world politics in the future. That is the goal of Turkish foreign policy and we will achieve it” (Fradkin & Libby, 2013).

Adapun mengenai definisi Neo-Ottomanisme sendiri, Omer Taspinar, seorang profesor dalam bidang politik Turki menyatakan bahwa untuk memahami konsep Neo-Ottomanisme dapat diklasifikasikan melalui beberapa indikator. Pertama, Neo-Ottomanisme dapat diartikan sebagai upaya untuk menghadirkan kembali warisan keislaman Turki di dalam maupun luar negeri (Taspinar, 2008). Walaupun begitu, Neo-Ottomanisme tidak sepenuhnya mewarisi ekspansi wilayah sebagaimana keberhasilan Turki Utsmani di berbagai wilayah. Dalam hal ini, Neo-Ottomanisme lebih menunjukkan perluasan pengaruh kepada

negara-negara yang pernah menjadi bagian Turki Utsmani maupun negara-negara lain dengan menggunakan cara yang lebih halus (*soft power*) baik dalam bidang politik, ekonomi, diplomasi, maupun budaya. Dengan mengusung konsep Neo-Ottoman, Turki mencoba untuk menghidupkan kembali perdamaian dan toleransi sebagaimana warisan Turki Utsmani terdahulu. Sehingga, identitas Turki yang multikultural, begitupun dengan keragaman etnis, agama, dll, tetap dapat hidup berdampingan dengan segala heterogenitas yang ada.

Kedua, Omer Taspinar juga menyatakan indikator pemahaman Neo-Ottomanisme berangkat dari adanya rasa agung dan kepercayaan diri dalam mengimplementasikan kebijakan luar negeri. Neo-Ottomanisme telah mendorong Turki untuk melihat dirinya sendiri sebagai negara superpower. Jejak sejarah kerajaan Turki Utsmani yang pernah berjaya telah memberikan semangat dan kepercayaan diri pada pemimpin saat ini demi masa depan bangsa Turki. Sebagai negara dengan sejarah peradaban besar, secara tidak langsung, Turki dituntut untuk dapat berperan aktif dalam hal politik, diplomasi, serta ekonomi dalam wilayah yang lebih luas dimana Turki menjadi pusatnya (Taspinar, 2008).

Walaupun begitu, pada dasarnya Neo-Ottomanisme tidak memiliki definisi yang paten. Merujuk pada kebijakan luar negeri berdasarkan Neo-Ottomanis, terdapat banyak interpretasi yang berbeda mengenai konsep Neo-Ottomanisme itu sendiri, sehingga terkadang menimbulkan ambiguitas yang mengurangi nilai analitis dan eksplanasi dari konsep tersebut. Namun begitu, setidaknya terdapat tiga gambaran Ottomanisme di era Ottoman yang dapat mendukung analisis dan penjelasan tentang kebijakan luar negeri Turki saat ini. Ketiga hal tersebut dikenal dengan tipologi Neo-Ottoman yang terangkum sebagai berikut (Hidayati, 2014);

1. Citra Turki Utsmani sebagai puncak kejayaan peradaban.

Dengan citra tersebut, Turki merasa perlu untuk menjaga marwah serta kebudayaan Turki Utsmani kepada masyarakat Turki dan juga masyarakat internasional. Sebagaimana Presiden Erdogan mengatakan sebagai berikut:

“Selama ribuan tahun, kita telah membawa peradaban yang unik, dimana kita

telah membangun peradaban tersebut dengan budaya yang beraneka ragam. Termasuk didalamnya adalah bahasa. Bahasa Turki bukan hanya bahasa komunikatif milik golongan tertentu saja, melainkan bahasa Turki juga merupakan bahasa pengetahuan dan sekaligus menjadi bahasa seni dan sastra..” (Czajka & Wastnidge, 2015).

2. Citra Turki Utsmani sebagai kerajaan beridentitas Islam.

Dalam hal ini, Neo-Ottomanisme dipandang sebagai penangkal ideologi Kemalisme yang erat kaitannya dengan sekularisme, nasionalisme, dan westernisasinya. Kebijakan luar negeri Turki juga telah bergeser untuk lebih fokus pada Timur Tengah, tetapi hal itu tidak berarti bahwa Turki sepenuhnya menjauh dari keterlibatannya terhadap Barat. Hal ini didukung oleh pernyataan Erdogan sebagai berikut: *“Turki saat ini menjalin hubungan dengan Dunia Barat, namun bukan berarti Turki berpaling dari Dunia Timur. Kita tidak dapat membedakan sikap kita kepada negara-negara yang selama ribuan tahun telah hidup berdampingan dengan Turki...” (Czajka & Wastnidge, 2015).*

3. Citra Turki sebagai pewaris kerajaan dan masyarakatnya yang multikultural.

Citranya sebagai pewaris kerajaan Ottoman membuat Turki menekankan pada penempatan posisi Turki sebagai pemimpin dunia Islam dengan cara-cara yang lebih modern. Dengan begitu, Turki juga merasa bertanggung-jawab atas segala permasalahan-permasalahan yang terjadi di dunia Islam.

Nampaknya Erdogan saat ini menggunakan identitas neo-Ottomanisme Turki untuk menunjukkan peran dan pengaruh Turki di panggung global, terlebih dimana konstelasi politik di Timur Tengah yang carut marut akan konflik. Kepentingan tersebut kemudian dilanjutkan dengan perumusan kebijakan-kebijakan luar negeri Turki diantaranya sebagai respon/tanggapan khususnya bagi wilayah Timur Tengah. Turki di bawah Erdogan telah turut terlibat aktif dalam konflik yang melanda Timur Tengah. Pada hakikatnya Neo-Ottomanisme

berusaha menyeimbangkan kembali hubungan Turki dengan Timur Tengah sebagaimana yang dilakukan Turki Utsmani dahulu. Kepentingan Turki untuk menjadi pemimpin dunia Islam, juga mendorong Turki untuk berperan aktif di kawasan maupun kancah global. Turki selalu berusaha menjadi yang terdepan dalam melindungi kawasan Islam yang terlibat konflik. Seperti dalam isu yang diangkat pada tulisan ini, normalisasi hubungan UEA-Israel mendapat banyak kecaman dari penjurmu muslim dunia, tak terkecuali dengan Erdogan.

Konstruktivisme Menurut Islam

Untuk dapat menjelaskan posisi Turki sebagai re-presentasi umat Islam dalam merespon normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dan Israel, maka kiranya diperlukan pembahasan mengenai pendekatan konstruktivisme dalam konsep hubungan internasional menurut Islam. Hal ini juga diperlukan karena, teori-teori yang diusung oleh Barat termasuk dengan konstruktivisme modern merupakan teori yang mengesampingkan nilai-nilai agama dan hal-hal metafisik. Walaupun begitu, pendekatan konstruktivisme dianggap sebagai teori yang dekat kaitannya dengan konsep hubungan internasional menurut Islam.

Pembahasan studi Hubungan Internasional dalam perspektif Islam jelas bukan pembahasan baru, meskipun pembahasan teori dan metodologi Hubungan Internasional dalam perspektif Islam baru belakangan ini menjadi bahan perdebatan sengit oleh komunitas epistemik pada akhir abad kedua puluh (Arif, 2016). Bahkan ilmu Hubungan Internasional dalam perspektif Islam sebenarnya sudah terkodifikasi jauh sebelum Barat memperkenalkan Ilmu Hubungan Internasional sebagai suatu disiplin ilmu tersendiri pada tahun 1919. Kajian hubungan internasional dalam tradisi keilmuan di dunia Islam telah menjadi suatu disiplin ilmu tersendiri yang biasa dikenal oleh ahli fiqh sebagai Siyar (Al-Shaybani, 1998, hal. xv).

Serupa tetapi tidak sama dengan pendekatan konstruktivis, dalam ajaran Islam; kedudukan norma, identitas, nilai dan spiritualitas memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari dunia material (Ahmadi, 2015). Muhammad Abu Zahrah (1973) juga menyebutkan bahwa hubungan internasional dalam Islam terikat oleh sepuluh prinsip muamalah dalam Islam

seperti: menghormati sesama manusia, semua manusia adalah satu umat, kerjasama antar umat manusia, toleransi, kebebasan beragama dan menentukan nasib, budi pekerti yang baik, keadilan, persamaan atau perlakuan yang sama, pemenuhan janji, serta kasih sayang antar sesama dan pencegahan kerusakan antar umat manusia (Ahmadi, 2015). Oleh karena itu, pendekatan konstruktivis digunakan karena dianggap lebih mampu menjelaskan bagaimana struktur identitas dan norma dapat mempengaruhi perilaku Turki dalam merespon normalisasi hubungan antara UEA dan Israel.

1.4. Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual dan landasan teori dalam artikel ini, penulis mencoba berasumsi bahwa identitas negara atau (*state identity*) merupakan hal yang mendasari Turki untuk mengambil kebijakan politik luar negeri dalam merespon hubungan normalisasi Uni Emirat Arab-Israel dengan melakukan kecaman dan pertimbangan pemutusan hubungan diplomatik dengan negara Uni Emirat Arab. Identitas negara Turki kemudian dijelaskan melalui konsep Neo-Ottomanisme dimana keinginan Turki untuk mengembalikan wajah Islam Turki Utsmani serta keinginan Turki sebagai pewaris kerajaan Ottoman untuk kembali menyebarluaskan pengaruh khususnya di wilayah Timur Tengah menjadi kedua aspek yang mendasari Turki untuk mengecam normalisasi UEA-Israel.

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui alasan mengapa Turki mengecam normalisasi hubungan UEA-Israel.

1.6. Metodologi

1. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif atau deskriptif yaitu dengan menggambarkan fenomena-fenomena yang terjadi untuk mengetahui kebijakan Turki dalam merespon normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel pada tahun 2020.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam tulisan ini adalah dengan mencari daftar pustaka, *library research*, yaitu dengan mengumpulkan data-data yang didapatkan melalui pencarian sejumlah literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Literatur tersebut berupa buku, jurnal, dokumen, makalah, laporan, majalah, surat kabar, artikel, dan internet.

3. Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan adalah metode deduktif, yaitu adalah dengan menggambarkan masalah secara umum, kemudian menarik kesimpulan khusus mengenai kebijakan Turki dalam merespon normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel.

1.7. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi masalah yang akan dideskripsikan, ruang lingkup penelitian mengenai ‘mengapa Turki merespon normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel’ dibatasi dengan fokus pada penjelasan dan analisis mengenai bagaimana respon Turki terhadap normalisasi tersebut dan mengapa Turki merespon normalisasi Uni Emirat Arab-Israel dengan mengancam tindakan tersebut yang padahal Turki sendiri merupakan negara

yang juga memiliki hubungan normalisasi dengan Israel. Dengan demikian, jangkauan penelitian ini dimulai dari tanggal dimulainya normalisasi Uni Emirat Arab-Israel pada tanggal 13 Agustus 2020 hingga permasalahan respon Turki terhadap UEA ini mengalami de-eskalasi pada akhir tahun 2020 silam.

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi yang akan diajukan ini terdiri dari lima bab:

BAB I

Pada bab ini, penulis memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, ruang lingkup penelitian, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

BAB II

Pada bagian ini, penulis menjelaskan mengenai hubungan kedekatan Turki dengan Palestina beserta respon apa yang ditunjukkan Turki terhadap normalisasi hubungan UEA-Israel. Terdapat dua sub-bab yang terangkai pada bagian ini. Pertama, posisi Turki dalam konflik Israel-Palestina yang didalamnya juga menjelaskan mengenai hubungan normalisasi Turki dengan Israel. Kedua, berisi penjelasan mengenai kebijakan apa yang diambil Turki dalam merespon normalisasi hubungan Uni Emirat Arab dengan Israel.

BAB III

Bagian ini menjelaskan mengenai analisis alasan Turki mengecam normalisasi hubungan UEA-Israel. Sub bab pertama memaparkan penjelasan mengenai State Identity Turki. Diantaranya berisi penjelasan mengenai identitas Turki sebagai negara dan penjelasan identitas Erdogan sebagai aktor yang memimpin negara Turki saat ini. Kedua, merupakan

analisis alasan mengapa Turki merespon normalisasi hubungan UEA-Israel yang akan dijelaskan dengan konsep Neo-Ottomanisme.

BAB IV

Bagian ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan.